



LITBANGDIKLAT PRESS  
BADAN LITBANG DAN DIKLAT  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
TAHUN 2020

# INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Tahun 2019



LITBANGDIKLAT PRESS  
BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Jl. MH Thamrin No.6 Jakarta 10340 | Telp. (021) 3920425  
Fax. (021) 3920421 | Website : balitbangdiklat.kemenag.go.id  
Email : sisinfobalitbangdiklat@kemenag.go.id

978-623-6925-10-2



9 786236 692510

Muhammad Adlin Sila & Fakhruddin

*Muhammad Adlin Sila & Fakhruddin*

# INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA



Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI

**Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019**

© Muhammad Adlin Sila & Fakhruddin. 2020.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

*All rights reserved*

---

x + 70 hlm; 145 x 205 mm

Cetakan I, Desember 2020

ISBN: 978-623-6925-10-2

---

**Penulis:**

Muhammad Adlin Sila & Fakhruddin

**Editor:**

Nurhata

**Desain Cover:**

Sri Wulandari

**Layout:**

cetakjogja.id

---

*Diterbitkan oleh:*

**Litbangdiklat Press**

Badan Litbang dan Diklat

Kementerian Agama RI

Jalan MH Thamrin No. 6 Jakarta 10340

Telp. 021 3920425

*Dicetak oleh:*

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

## SAMBUTAN

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kekuatan untuk mewujudkan laporan penelitian tahun 2019 berupa buku dengan judul *Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019*. Buku ini merupakan laporan hasil kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2019.

Untuk itu, dengan selesainya laporan kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat yang telah memberikan arahan. Ucapan terima kasih kepada seluruh peneliti dan pihak lain yang mendukung secara penuh terhadap survei tersebut sampai mewujudkan pada laporan ini. Tentunya bukanlah pekerjaan yang mudah dan membutuhkan keseriusan dari awal penyusunan sampai pengumpulan data di lapangan.

Laporan hasil survei ini diharapkan akan lebih memudahkan bagi masyarakat khususnya para pemerhati sosial keagamaan, para peneliti, serta lembaga lain dalam hal menyusun analisis ataupun seting sosial terhadap penyusunan kebijakan. Kami yakin informasi tentang rata-rata kerukunan

ini dapat juga membantu para pemegang kewenangan di daerah dalam hal membina kehidupan sosial keagamaan.

Apabila dalam laporan ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, baik substansi maupun teknis kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap ada masukan serta saran untuk penyempurnaan dan perbaikan laporan kegiatan ini.

Jakarta, 2 November 2020  
Kepala Puslitbang Bimas Agama dan  
Layanan Keagamaan

Prof. Dr. Muhammad Adlin Sila, Ph.D.

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur selalu kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga tim penulis berhasil menyelesaikan buku *Indeks Kerukunan Umat Beragama*, dengan tepat waktu, tanpa ada kendala berarti.

Tujuan dari penyusunan buku ini untuk melihat tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia pada umumnya. Selain itu, buku hasil penelitian ini juga berguna bagi pengembangan ilmu humaniora lainnya.

Keberhasilan penyusunan buku bukan semata atas usaha penulis sendiri, melainkan banyak pihak yang turut membantu dan memberikan dukungan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil.

Buku yang ada di hadapan pembaca tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan. Oleh sebab itu saran, kritik, dan masukan yang produktif, dari para pembaca sangat kami harapkan. Kami membuka diri untuk meningkatkan kualitas, kelengkapan, dan kesempurnaan buku ini.

*Akhirul kalam*, semoga buku ini bermanfaat.

Selamat membaca.



## PROLOG

Kerukunan umat beragama menjadi wacana utama yang mengisi berbagai diskusi, sebagai respon atas realitas disharmoni antarumat beragama. Disharmoni antarumat beragama timbul dari suatu pemahaman bahwa satu kelompok dianggap paling benar sementara yang lain sebaliknya. Semangat beragama berlebih tanpa bekal ilmu agama menjadi salah satu pemicunya. Persoalan politik juga memainkan peranan penting dalam mengindoktrinasi pandangan seperti itu. Pada titik tertentu, masalah tersebut, terkadang berujung pada konflik horizontal.

Dalam sejumlah historiografi tradisional dijelaskan bahwa kerukunan umat beragama telah berlangsung sejak beberapa abad silam. Kemunculan agama Islam di tengah agama sebelumnya (Hindu-Budha) mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar dan penguasa setempat. Toleransi begitu dijunjung tinggi pada masa itu. Pengalaman empirik dalam mengelolah kerukunan umat beragama menjadi modal penting bagi kehidupan keagamaan saat ini. Namun bentuk ekspresinya memerlukan rumusan, sebagai indikator apakah kerukunan umat beragama di lingkup masyarakat tertentu sudah berjalan atau justru mengalami degradasi.



Kerukunan umat beragama dipengaruhi oleh faktor pendidikan, peran pemerintah, dan kearifan lokal yang ada. Pendidikan seseorang akan mempengaruhi pola pandang dalam melihat realitas yang berada di sekitarnya. Pendidikan di sini tidak melulu yang bersifat formal, melainkan non formal. Pemerintah sebagai institusi yang berbeda dari agama perlu hadir di tengah keragaman (agama) karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Sementara kearifan lokal sebagai hasil pengalaman kolektif kelompok masyarakat memiliki potensi besar dalam mendorong kerukunan umat beragama.

Terdapat tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Pertama, toleransi, yaitu sikap saling menerima dan saling menghargai antara satu kelompok agama terhadap agama lain. Kedua, kesetaraan, maksudnya kemauan saling melindungi serta memberikan hak dan kesempatan satu sama lain. Ketiga, kerja sama, yakni bersosialisasi serta saling berempati dan bersimpati baik dalam persoalan sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Ketiga indikator tersebut sebagai tolok ukur untuk mengetahui tingkat kerukunan umat bergama suatu masyarakat. Capaian pada tiga indikator tersebut juga sejalan dengan rencana strategis Kementerian Agama.

Melalui kajian penelitian Indeks Kerukunan Umat Beragama akan tampak seberapa besar skor kerukunan umat beragama di suatu daerah. Tiga indikator yang diuraikan dalam penelitian ini dapat dipakai sebagai perspektif untuk mengidentifikasi tingkat kerukunan umat beragama di daerah-daerah di Indonesia.

## DAFTAR ISI

<b>Sambutan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Prolog .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	3
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Tinjauan Literatur .....	8
G. Metodologi Penelitian .....	14
<b>BAB II: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
A. Deskriptif Identitas Responden.....	20
B. Model Pengukuran Variabel .....	24
C. Pola Pendidikan Keluarga (X <sub>1</sub> ) .....	34
D. Peran Kementerian Agama (X <sub>2</sub> ).....	40
E. Implementasi Kearifan Lokal (X <sub>3</sub> ) .....	47
F. Model Persamaan Struktural (SEM).....	54
G. Analisis Cluster.....	58

<b>BAB III: PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Rekomendasi.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>69</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tentang kebijakan pembangunan agama salah satunya melalui upaya peningkatan kerukunan umat beragama. Dalam amanat ini terdapat rencana strategis Kementerian Agama yakni menguatnya harmoni dan kerukunan umat beragama. Dengan demikian keberhasilan pembangunan di bidang agama salah satunya dengan melihat kondisi kerukunan umat beragama.

Pembangunan kerukunan sangat bervariasi di setiap wilayah, di mana beberapa aspek kerukunan di wilayah tertentu menjadi perhatian dan berhasil diwujudkan atau justru menjadi hambatan dalam memajukan kerukunan. Oleh sebab itu perlu tolok ukur keberhasilan pembangunan kerukunan umat beragama berdasarkan capaian nasional.

Berbagai hasil penilaian dan kajian tentang capaian kerukunan telah dibuat, namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran karena dilakukan berdasarkan

tujuan, teknis, dan standar yang berbeda-beda. Indeks kerukunan yang akan dibentuk itu adalah berdasarkan tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima dan menghargai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi hak dan kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya kerja sama, menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Dengan kerja sama yang tulus, terbangun kepercayaan yang kuat dengan pemahaman bahwa mereka dapat hidup berdampingan dengan damai, tenang, saling memajukan dan menguatkan, tidak untuk saling menyakiti dan menyingkirkan. Semuanya disusun secara komprehensif dengan standar nasional untuk digunakan secara berkala.

Berdasarkan hasil-hasil kajian terhadap pengalaman bangsa dalam membangun kerukunan selama ini, tampak bahwa arah dan sasaran kebijakan ditetapkan secara sporadis, belum berdasarkan *blueprint* yang kuat. Program kerukunan umat beragama umumnya diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang kurang mempertimbangkan tahapan dan skala prioritas kebutuhan nasional maupun daerah serta tidak berlandaskan kajian empirik. Akibatnya, problema kerukunan sering tidak teratasi secara mendasar sehingga rentan memunculkan gejolak dan gangguan terhadap stabilitas pembangunan bangsa. Dengan dibuatnya indeks kerukunan melalui

instrumen yang dikaji secara intensif, maka tersedia tolak ukur penilaian pembangunan kerukunan di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini diperlukan terkait rujukan dalam intervensi pembangunan yang bersifat strategis program kerukunan oleh pemerintah, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah daerah, Kementerian Polhukam, Kemendagri, BAPPENAS, dan instansi terkait.

## **B. Batasan Masalah**

Pelaksanaan survei kerukunan hidup umat beragama ialah “suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara, dalam menjalankan agama, serta bekerja sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Berdasarkan rumusan itulah survei 2016 menarik tiga unsur untuk dijadikan indikator utama dalam pengumpulan data: toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.

### **1. Toleransi**

Toleransi adalah sikap atau sifat menenggang, yaitu menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, dan lain-lainnya, yang berbeda dengan pendirian sendiri.<sup>1</sup> Adapun toleransi sebagaimana dimaknai oleh Margareth Sutton adalah kemampuan dan

---

1 Said Agil Husin Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antaragama*, Penerbit Ciputat Press, Jakarta, hlm. 13.

kemauan seseorang/individu dan masyarakat umum untuk menghargai dan berhati-hati terhadap hak-hak orang golongan kecil/minoritas di mana mereka hidup dalam peraturan yang dirumuskan oleh mayoritas.<sup>2</sup>

Makna yang lain, menurut Davit Little, dosen di *Practice of Religion, Ethnicity and International Conflict, School of Divinity*, Universitas Harvard mempunyai arti menghormati pandangan orang lain dan tidak menggunakan pemaksaan atau kekerasan kepada orang lain. Toleransi diartikan juga sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.<sup>3</sup> Toleransi antaragama adalah kesediaan seseorang untuk menerima atau bahkan menghargai orang lain yang berbeda agama atau bahkan yang tak disetujuinya sehingga orang tersebut tetap punya hak yang sama sebagai warga negara (Sulvivan, Pierson, dan Marcus, 1982: 2).

Dari sejumlah makna toleransi yang dikonsepsikan para ahli tadi, dapat ditarik dua makna besar: menerima dan menghormati orang lain yang berbeda keyakinan/

---

2 Margareth Sutton, *Toleransi: Nilai dalam Pelaksanaaa Demokrasi*, dalam *Majalah Demokrasi*, Volume V Nomor 1 Tahun 2006, halaman 53–60.

3 Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antaragama*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1979, hlm. 22.

kepercayaan. Selanjutnya dari dua makna ini dikembangkan lagi maknanya masing-masing, dan masing-masing makna tersebut dijadikan subindikator sebagai dasar penarikan pertanyaan/kuesioner:

Menerima (penerimaan)

1. Memberi kesempatan berinteraksi pada orang yang berbeda;
2. Menciptakan kenyamanan;
3. Tidak menggunakan kekuatan (memaksa) terhadap kepercayaan dan praktek yang menyimpang;
4. Penghargaan pada keragaman budaya;
5. Mengenal sikap tidak toleran.

Menghormati

1. Kesiediaan untuk menghargai;
2. Menghargai dan menghormati;
3. Berhati-hati terhadap hak orang lain.

## 2. Kesetaraan

Konsep tentang kesetaraan dimaknai antara lain sebagai pandangan dan sikap hidup menganggap semua orang adalah sama dalam hak dan kewajiban. Hak atas melaksanakan agama beribadah dan kewajiban terhadap kehidupan bernegara dan bersosialisasi dengan penganut agama lain sebagai sesuatu yang alamiah.<sup>4</sup> Ukuran kesetaraan dari berbagai sumber diperoleh tingkatan yang sama (tidak ada diskriminasi; relasi

---

4 John Locke (1632 – 1704), *Two Treatises of Government* (2013), page 8.



timbang balik), kesempatan yang sama (kebebasan beraktifitas keagamaan; menjaga hak orang lain), dan perlindungan (perlindungan terhadap perbedaan penghinaan agama).

### 3. Kerja Sama

Kerja sama adalah tindakan bahu-membahu (*to take and give*) dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama kerja sama. Tindakan ini menggambarkan keterlibatan aktif individu bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati pada berbagai dimensi kehidupan, seperti kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Pengertian lainnya adalah realitas hubungan sosial dalam bentuk tindakan nyata.<sup>5</sup> Misalnya, dalam tindakan tolong-menolong atau gotong-royong antarkelompok agama. Koentjaraningrat menjelaskan kerja sama dapat terwujud karena adanya interaksi antara satuan-satuan yang aktif (Koentjaraningrat, dkk., 2003:79). Sedangkan Ashutosh Varshney melihat kerja sama dalam bentuk hubungan ikatan-inter-komunal—atau jaringan yang mengintegrasikan dua pemeluk agama. Dalam hal ini Robert Putnam menyebut hubungan ini sebagai modal sosial yang menjembatani (*bridging*); kemudian hubungan antarpemeluk di luar ikatan atau organisasi yang beranggotakan seagama sebagai modal sosial yang mengikat (*bonding*). Selanjutnya Varshney<sup>6</sup> membagi jaringan menjadi dua bentuk: a) asosiasional, yakni sebagai bentuk ikatan kewargaan ke dalam organisasi bisnis,

---

5 Tangkilisan, *Manajemen Publik*, 2005, halaman 86.

6 *ibid*

ikatan profesi, klub olah raga, dan serikat buruh; b) quotidian, adalah hubungan keseharian yang terbentuk ke dalam ikatan yang tidak membutuhkan organisasi, atau berupa interaksi kehidupan yang sederhana dan rutin, seperti saling kunjung antara keluarga yang berbeda agama, kegiatan makan bersama, berpartisipasi bersama dalam upacara-upacara hari kemerdekaan, mengizinkan anak-anak mereka untuk bermain bersama di lingkungan (lihat Varshney, 2009).<sup>7</sup>

Interaksi yang tersirat dalam konsep relasi (kerja sama) dalam penelitian ini adalah interaksi sosial (termasuk sosial keagamaan), yaitu jaringan hubungan antara dua orang atau lebih atau antara dua golongan atau lebih yang menjadi syarat bagi kehidupan bermasyarakat (Koentjaraningrat, dkk., 2003: 90).<sup>8</sup> Tindakan kerja sama menempati variabel tertinggi dari kerukunan karena kerja sama bisa terwujud manakala toleransi dan kesetaraan sudah berada pada kondisi yang baik.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan di atas, survei ini hendak menjawab pertanyaan:

1. Berapa indeks kerukunan umat beragama di Indonesia tahun 2019?
2. Bagaimana peta variasi kerukunan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia berdasarkan indeks tersebut?

---

7 *ibid*

8 *ibid*

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan kegiatan ini adalah untuk:

1. Mengetahui tingkat indeks kerukunan umat beragama di Indonesia tahun 2019.
2. Mengetahui peta variasi kerukunan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat survei bagi institusi dan akademik adalah:

1. Memberikan informasi dan masukan bagi instansi/ lembaga terkait tentang peta indeks kerukunan umat beragama di Indonesia dalam bentuk data GIS (*Geographic Information Systems*).
2. Menjadi bahan kebijakan bagi pemerintah Indonesia dalam rangka membangun iklim/kondisi kerukunan umat beragama yang lebih kondusif.
3. Sedangkan manfaat akademiknya, menyediakan referensi bagi akademisi, pakar, dan para pemerhati kerukunan dan sosial keagamaan sebagai bahan kajian lebih lanjut.

#### **F. Tinjauan Literatur**

Survei kerukunan antarumat beragama telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Pertama pada tahun 2009, penelitian dilakukan di daerah Jawa Barat (di 26 kabupaten) menghasilkan gambaran kerukunan cukup toleran di masing-masing kabupaten yang diteliti. Pada tahun 2012

dilakukan pula survei kerukunan umat beragama berskala nasional di 33 provinsi. Hasilnya, antara lain memperlihatkan bahwa indeks tentang kerukunan beragama masih cukup baik, yakni dengan indeks rata-rata 3.67.

Selain Badan Litbang Kementerian Agama, CSIS juga melakukan survei kondisi intoleransi umat beragama pada tahun 2012 di 23 provinsi. Hasil Surveinya menunjukkan kondisi intoleransi kian meningkat. Perihal itu, antara lain, ditandai dengan soal pembangunan rumah ibadah agama lain di lingkungan responden memperoleh angka cukup tinggi: sebanyak 68,2% responden menyatakan lebih baik hal itu tidak dilakukan; 22,1% menyatakan tidak berkeberatan.

Secara keseluruhan, survei di atas memperlihatkan dua buah hasil berbeda. Dua buah survei pertama menunjukkan bahwa kerukunan di Indonesia cukup baik, sementara sebuah survei lainnya menyatakan sebaliknya. Hasil yang bertolak belakang ini menggambarkan adanya persoalan dalam pelaksanaan masing-masing penelitian, antara lain bahwa survei kerukunan yang dilaksanakan kurang dibangun berlandaskan konsep kerukunan yang jelas. Padahal konsep ini syarat penting untuk dapat menarik indikator, dimensi, dan subdimensi untuk dapat dikeluarkan kuesioner yang tepat. Dalam kaitan itu, item-item pertanyaan dalam penelitian tersebut sebagaimana dipandang kurang representatif mengukur indikator yang dibuat sehingga hasil yang diperoleh diasumsikan belum menggambarkan kondisi kerukunan secara riil di masyarakat.

Pada tahun 2015 Puslitbang Kehidupan Keagamaan kembali melakukan survei. Kali ini memulainya, pertama, dari upaya membangun landasan konsep kerukunan dengan mengumpulkan konsep sebanyak mungkin. Kemudian dari sejumlah konsep tersebut disandingkan satu sama lain untuk dilihat persamaan maupun perbedaan. Unsur-unsur yang sama disatukan satu dengan yang lain dan unsur berbeda tersisa dijadikan indikator. Hasil akhir diperoleh tiga buah indikator utama: toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Selanjutnya, dari indikator utama ini ditelusuri kembali konsep-konsep berkaitan. Dengan mengikuti proses seperti pencarian indikator di atas, diperoleh hasil akhir subindikator dari toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Kemudian dari subindikator ini ditarik sejumlah instrumen/kuesioner untuk dilakukan uji coba lapangan. Uji coba instrumen survei indeks kerukunan tahun 2015 menunjukkan hasil yang reliabel dan validibel. Atas dasar itu dilaksanakan survei indeks kerukunan tahun 2015. Hasil survei menunjukkan capaian indeks tahun 2015 sebesar 75,36 poin.

Dalam forum seminar, workshop, dan diskusi mengenai hasil survei 2015, diperoleh sejumlah tanggapan, kritikan, dan masukan terhadap survei 2015, antara lain perlunya penguatan konsep kerukunan. Sebenarnya tiga dimensi yang digunakan pada penelitian tahun 2015, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama, dipandang sudah cukup baik. Hanya disarankan agar dibangun argumen yang lebih kuat supaya lebih teruji dihadapan para ahli. Selebihnya, beberapa

saran mengusulkan perbaikan bentuk penyajian hasil yang lebih sederhana dan mudah dimengerti.

Penelitian survei 2016 dilaksanakan dengan kajian pengokohan konsep kerukunan dan metodologi. Dalam katan itu, kembali diundang para ahli untuk memperoleh tanggapan dan masukan tentang konsep kerukunan dan metodologi yang diperbaiki. Perbaikannya terutama menyangkut orientasi pengukuran yang lebih condong pada ukuran tindakan daripada persepsi. Selain itu dilakukan juga perbaikan mengenai sampling dan responden. Dalam hal ini selain penambahan jumlah responden yang lebih signifikan juga diperluas basis wilayahnya, mencakup perkotaan dan pedesaan. Jika pada tahun 2015 responden hanya perkotaan, maka pada tahun 2016 ditambah responden berbasis pedesaan. Data penelitian survey KUB ini dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dalam penelitian Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), statistik inferensial yang digunakan adalah analisis *Structural Equation Modeling (SEM)*. Berdasarkan analisis tersebut, Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia tahun 2016 berada pada angka 67,65 %, masuk pada kategori Tinggi, dengan tingkat kepercayaan 98,8%”.

Angka 67,65% diperoleh dengan menggunakan instrumen responden gabungan heterogen, minoritas homogen, dan mayoritas homogen. Akan tetapi apabila dilihat berdasarkan basis responden sama dengan survey tahun 2015, yakni hanya responden heterogen (urban). Indeks kerukunan antarumat beragama berada di angka 75,47%, terdapat kenaikan sebesar

0,12 dari tahun 2015. Angka indeks ini diperoleh dari hasil pengukuran tiga indikator: toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.

Dalam survei ini, konsepsi dasar yang digunakan untuk menarik indikator adalah pengertian kerukunan sebagaimana dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006/8 Tahun 2006, yaitu: “Keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”<sup>9</sup>

Untuk keperluan mendapatkan rumusan indikator, konsep kerukunan di atas disandingkan dengan konsep para ahli, antara lain: A.Mukti Ali, Menteri Agama 1971-1978, mengatakan bahwa “Kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing- masing

---

9 *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Bab I, pasal 1, ayat 1.*

hidup sebagai pemeluk agama yang baik, dalam keadaan rukun dan damai”.<sup>10</sup>

Bahrul Hayat, dalam bukunya *Mengelola Kemajemukan*, menyebutkan setidaknya ada tiga prinsip dasar untuk menjamin agar agama menjadi faktor integrasi bangsa, yaitu prinsip mengakui (*to accept*), menghargai (*to respect*) eksistensi agama lain, dan kerja sama (*to cooperate*). Prinsip resiprokal adalah prinsip bahu-membahu (*to take and give*) dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama dalam mencapai tujuan bersama.<sup>11</sup>

Konsepsi kerukunan lainnya diuraikan oleh Hasbullah Bakri, dalam bukunya *Pendekatan Dunia Islam dan Dunia Kristen*. Menurutnya, kerukunan beragama dalam pengertian praktis dapat diartikan koeksistensi secara damai antara satu atau lebih golongan agama dalam kehidupan beragama.<sup>12</sup> Sementara penulis lainnya, Amir Syarifuddin, mengatakan, “Kerukunan hidup antarumat beragama adalah suatu cara untuk mempertemukan, atau mengatur hubungan luar antara orang-orang berlainan agama dalam proses bermasyarakat.

---

10 A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia VI*, (Jakarta : Biro Hukum dan Humas Departemen Agama, 1975), h. 70.

11 Hal yang sama dapat dirujuk dalam Bernard Adeney “Religion, Violence and Diversity: Negotiating the Boundaries of Indonesian Identity”, dalam Carl Sterkens, Muhammad Machasin, and Frans Wijzen, *Religion, civil society and conflict in Indonesia* (Zurich, 2009, Lit Verlag), halaman 25. Keduanya, multicultural dan resiprokal mengarah pada menjunjung tinggi hak asasi manusia.

12 Hasbullah Bakri, *Pendekatan Dunia Islam dan Dunia Kristen*, (Jakarta : PT.Grafin Utama , 1983), h. 6.



Jadi kerukunan antarumat beragama tidak berarti menyatukan agama-agama yang berbeda.”

Dari pengertian kerukunan di atas dapat dilihat beberapa persamaan esensial, yaitu: (a) kerukunan umat beragama sebagai suatu keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing; (b) dalam interaksi tersebut tidak merendahkan agama satu atas agama yang lain, dengan kata lain setara dalam menjalankan agamanya, juga tidak mencampuradukkan dan melanggar norma-norma agama; (c) bekerja sama dalam membangun masyarakat, dengan prinsip saling bahu (*to take and give*) dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama dalam mencapai tujuan bersama, bangsa, dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Metodologi Penelitian**

Survei ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara tatap muka dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan (kuesioner). Wawancara dilakukan oleh petugas wawancara yang telah dilatih sebelumnya untuk keperluan survei ini. Jumlah petugas wawancara yang diterjunkan sebanyak 680 orang. Pelatihan (*couching*) terhadap petugas wawancara dilakukan oleh tim peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Wawancara

dilakukan pada tanggal 16–19 Mei 2019 dan 18–24 Juni 2019. Untuk memastikan wawancara dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, dilakukan pengecekan (*spot check*) terhadap 20% dari jumlah total sampel.

## 2. Populasi dan Sampel

Populasi survei ini adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah sampel yang diambil di masing-masing provinsi sebanyak 400 responden, sehingga jumlah keseluruhan sampel 13.600 responden. Tingkat kesalahan penarikan sampel (*margin of error*) untuk nasional tingkat kepercayaan sebesar 95% sebesar  $\pm 1,7\%$  dan untuk masing-masing provinsi pada tingkat kepercayaan sebesar 95% adalah  $\pm 4,8\%$ .

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik pengambilan sampel secara acak berjenjang (*multistage random sampling*). Penarikan sampel diawali dengan memilih secara acak di empat kabupaten/kota di masing-masing provinsi. Selanjutnya di tiap kabupaten/kota dipilih secara acak sepuluh desa/kelurahan. Kemudian di tiap desa/kelurahan dipilih sepuluh Kepala Keluarga (KK). Di masing-masing KK, dengan menggunakan metode *Kish Grid*, dipilih satu responden pria atau satu responden wanita. Jumlah responden pria dan wanita ditetapkan seimbang, masing-masing lima orang, untuk setiap desa/kelurahan.

Penarikan sampel diawali pada level provinsi, dipilih secara acak 40 desa/kelurahan dengan asumsi setiap desa/

kelurahan akan diambil sepuluh responden (total responden setiap provinsi adalah 400 orang). Dengan pengambilan lokasi sampel sebanyak ini diharapkan survei akan dapat merepresentasikan jawaban (generalisasi) sikap seluruh masyarakat beragama dalam hal hubungan mereka dengan pemeluk agama lainnya, baik untuk setiap provinsi juga agregat secara Nasional. Pemilihan PSU pada tahap ini dilakukan secara acak dan proporsional mengacu pada data kategorisasi rural-urban BPS. Tahap selanjutnya adalah memilih sepuluh anggota rumah tangga yang dilakukan secara random dalam desa/kelurahan terpilih dengan menggunakan metode *Kish Grid*. Proporsi jenis kelamin yang diambil untuk setiap desa/kelurahan adalah lima orang laki-laki dan lima orang perempuan.

### **3. Teknik Analisis Data**

Data penelitian ini dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis frekuensi dan tabulasi silang (*cross tabulation*) digunakan untuk menyajikan gambaran deskriptif indeks kerukunan secara nasional maupun berdasarkan provinsi. Dalam penelitian Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), statistik inferensial yang digunakan adalah analisis Structural Equation Modeling (SEM).

### **4. Skor Kerukunan Umat Beragama**

Angka survei secara nasional dan provinsi dapat dipahami sebagai nilai yang diperoleh pada lima kategorisasi:

Diagram 1: Kategori Kerukunan

0 – 20	Sangat Rendah
21 – 40	Rendah
41 – 60	Sedang
61 – 80	Tinggi
80 – 100	Sangat Tinggi

Nilai kerukunan umat beragama yang ini sebagai gambaran capaian pada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui berapa skor rata-rata kerukunan nasional; berapa skor rata-rata provinsi? Pertanyaan berikutnya faktor apa yang mempengaruhi kerukunan, baik itu pada peristiwa aktual ataupun beberapa isu yang masih cukup aktual. Dalam hal analisis, pemahaman terhadap dinamika angka yang muncul tiap tahun juga.



## BAB II

# HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas analisis data hasil penelitian Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama pada Tahun 2019 yang berjudul *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2019*, yang bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Pola Pendidikan Keluarga ( $X_1$ ), Peran Kementerian Agama ( $X_2$ ), Implementasi Kearifan Lokal ( $X_3$ ), terhadap Indeks Kerukunan Umat Beragama ( $Y$ ). Analisis hasil penelitian dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Berikut di bawah ini struktur penyajiannya:

1. Analisis Deskriptif Identitas Responden Usia
  - a. Mayoritas-minoritas Agama;
  - b. Pendidikan Terakhir;
  - c. Pendapatan.
2. Model Pengukuran Variabel
  - a. Indeks Kerukunan Umat beragama ( $Y$ );
  - b. Pola Pendidikan Keluarga ( $X_1$ );
  - c. Peran Kementerian Agama ( $X_2$ );

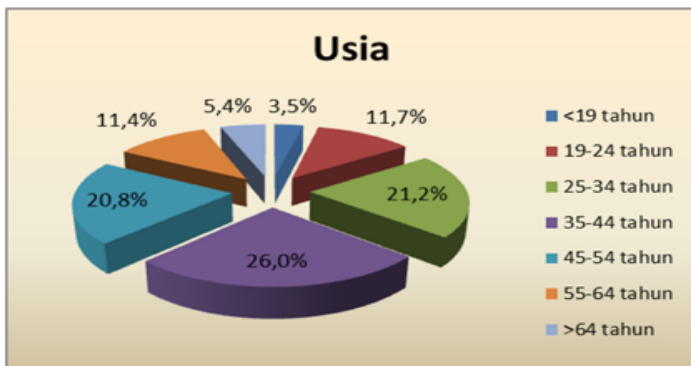
- d. Implementasi Kearifan Lokal (X<sub>3</sub>).
3. Model Persamaan Struktural (SEM)/Pengaruh Variabel Pola Pendidikan Keluarga (X<sub>1</sub>), Peran Kementerian Agama (X<sub>2</sub>), Implementasi Kearifan Lokal (X<sub>3</sub>), terhadap Indeks Kerukunan Umat Beragama (Y).
  4. Analisis *Cluster*

Berikut disajikan hasil analisis data 13600 responden yang merupakan representasi masyarakat di 34 provinsi se-Indonesia yang diteliti pada Tahun 2019 dengan diferensiasi karakteristik berupa WNI berusia 17 tahun lebih atau yang telah menikah dan dianggap mewakili masyarakat desa atau kota.

## A. Deskriptif Identitas Responden

### 1. Usia

Gambar 1

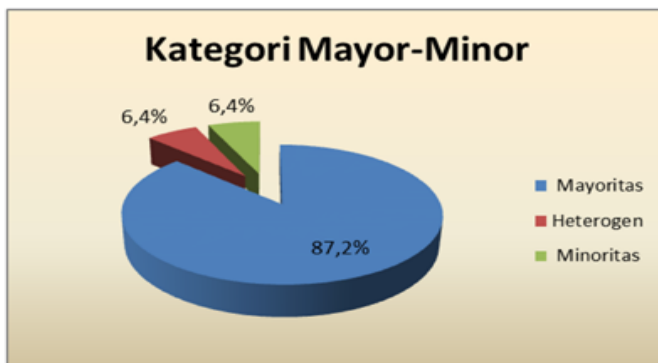


Tabel di atas menunjukkan sebaran karakteristik responden selaku masyarakat dengan kriteria berusia 17 tahun

ke atas dan/atau sudah menikah di 34 provinsi se-Indonesia. Hampir seperempat dari total responden merupakan masyarakat dengan rentang usia 35-44 tahun yaitu sebanyak 26,0%, disusul oleh para responden dengan rentang usia 25-34 tahun sebanyak 21,2%. Berikutnya, responden dengan rentang usia 45-54 tahun yang mencapai sebanyak 20,8%. Sedangkan yang paling sedikit adalah responden yang berada pada rentang usia <19 tahun, yang hanya mencapai sebanyak 3,5% saja.

## 2. Mayoritas-Minoritas Agama

Gambar 2



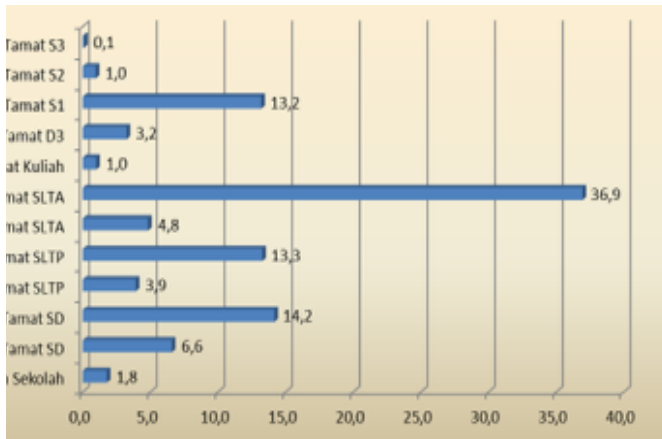
Gambar di atas menunjukkan sebaran karakteristik responden selaku masyarakat dengan kriteria berusia 17 tahun ke atas dan/atau sudah menikah di 34 provinsi se-Indonesia. Terlihat bahwa hampir seluruh responden merupakan masyarakat yang merupakan pemeluk agama mayoritas pada kondisi sosial demografi yang homogen yaitu sebanyak 87,2%, kemudian sebagian kecil dari seluruh responden masuk ke



dalam kategori minoritas dari kondisi sosial homogen yaitu sebanyak 6,4% dan sebagian kecil dari seluruh responden yang tinggal di lingkungan sosial demografi heterogen sebanyak 6,4%.

### 3. Tingkat Pendidikan

Gambar 3

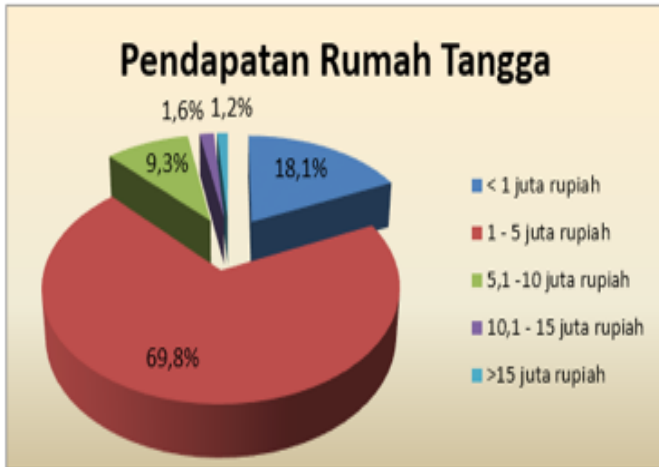


Tabel di atas menunjukkan sebaran karakteristik responden selaku masyarakat dengan kriteria berusia 17 tahun ke atas dan/atau sudah menikah di 34 provinsi se-Indonesia. Hampir setengah dari seluruh responden merupakan masyarakat yang memiliki pendidikan terakhir Tamat SLTA yaitu sebanyak 36,9%, kemudian disusul oleh para responden yang merupakan responden Tamat SD dengan persentase sebanyak 14,2%. Kemudian responden yang Tamat SLTP dan tamat S1 masing-masing sebanyak 13,3% dan sebanyak 13,2%, sedangkan responden yang berada pada tingkat

pendidikan lain masing-masing hanya berada di bawah 7,0% saja. Responden paling sedikit adalah responden yang Tamat S3 yang hanya mencapai 0,1% saja.

#### 4. Pendapatan

Gambar 4



Tabel di atas menunjukkan sebaran karakteristik responden selaku masyarakat dengan kriteria berusia 17 tahun ke atas dan/atau sudah menikah di 34 provinsi se-Indonesia. Lebih dari setengah dari total responden merupakan masyarakat yang memiliki pendapatan rumah tangga pada rentang 1-5 juta rupiah yaitu sebanyak 69,8%, kemudian disusul oleh para responden dengan pendapatan rumah tangga pada rentang <1 juta rupiah sebanyak 18,1%. Selanjutnya responden yang memiliki pendapatan rumah tangga 5,1-10 juta rupiah mencapai sebanyak 9,3%. Dan responden yang memiliki pendapatan rumah tangga 10,1-15

juta dan >15 juta rupiah masing-masing sebanyak 1,6% dan 1,2% saja.

## B. Model Pengukuran Variabel

Tiga variabel utama, dalam penelitian ini, akan diuji secara sistematis yaitu Pola Pendidikan Keluarga ( $X_1$ ), Peran Kementerian Agama ( $X_2$ ), Implementasi Kearifan Lokal ( $X_3$ ), dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (Y).

Hasil try out dan primary survey diperoleh hasil analisis deskriptif dan inferensial. Hasil diperoleh dari semua variabel yang diteliti.

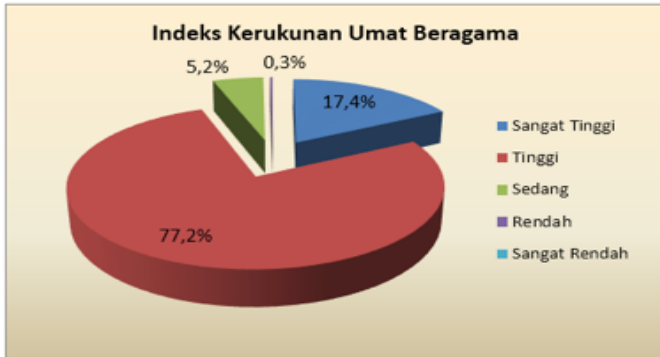
Indeks Kerukunan Umat Beragama (Y)

Berdasarkan pada hasil perhitungan deskriptif terhadap 34 provinsi se-Indonesia diperoleh hasil analisis kategori, untuk variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama (Y) dari seluruh responden yang berjumlah 13600 responden sebagai berikut:

Tabel 1

Indeks Kerukunan Umat Beragama	F	%
Sangat Tinggi	2361	17,36
Tinggi	10496	77,18
Sedang	708	5,21
Rendah	35	0,26
Sangat Rendah	0	0,00
Total	13600	100,00

Gambar 5



Tabel 1 di atas merupakan hasil analisis deskriptif terhadap Variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama (Y) yang dirasakan oleh responden selaku masyarakat dengan kriteria berusia 17 tahun ke atas dan/atau sudah menikah di 34 provinsi se-Indonesia sebanyak 13600 responden.

Hasil analisis menunjukkan bahwa lebih dari setengah total responden merupakan responden yang memiliki tingkat Indeks Kerukunan Umat Beragama (Y) berada pada kategori Tinggi, terlihat dari tabel tersebut 10496 responden (77,18%) memiliki skor penilaian Indeks Kerukunan Umat Beragama yang berada pada kategori *TINGGI*, bahkan sebanyak 2361 responden (17,36%) yang memiliki skor penilaian Variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama yang berada pada kategori *SANGAT TINGGI*.

Kemudian, sebanyak 708 responden (5,21%) memiliki skor penilaian Variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama yang berada pada kategori *SEDANG*.

Akan tetapi sebanyak 35 responden (0,26%) memiliki skor penilaian Indeks Kerukunan Umat Beragama yang berada pada kategori *RENDAH*, Dan tidak ada satu respondenpun yang memiliki skor penilaian Indeks Kerukunan Umat Beragama yang berada pada kategori kategori *SANGAT RENDAH*.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama (Y) bagi responden di 34 provinsi se-Indonesia yang berjumlah 13.600 orang. Dengan uji statistik Uji 1 rata-rata diperoleh skor total variabel sampai pada nilai minimal, yang ditetapkan oleh peneliti sebagai standar variabel, yang termasuk kategori optimal.

Tabel 2

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Kesimpulan
	Rerata	Simpangan Baku			
Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,83	9,12	73,90	Signifikan	60,00
			74,00	Tidak Signifikan	Tingkat Kerukunan Umat Beragama Tinggi

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama (Y) secara real dari 13.600 responden yang diteliti hanya mencapai nilai rerata sebesar 73,83 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 9,12. Skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan di angka 73,90. Adapun di atas itu, misal di angka 74,00 diketahui tidak signifikan.

Angka 73,90 berarti dapat disimpulkan bahwa “pada populasi masyarakat di 34 provinsi se-Indonesia, skor total Variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama (Y) signifikan di angka 73,90 yang berarti Indeks Kerukunan Umat Beragama termasuk ke dalam kategori Optimal ( $> 60.00$ )”.

Cukup optimalnya variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama masyarakat di 34 provinsi se-Indonesia, tentu saja terkait dengan skor semua dimensi penelitian. Maka perlu diperhatikan poin mana yang memiliki persentase tinggi, sedang, rendah, atau sangat rendah. Dari situ dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam meningkatkan variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama, sehingga mencapai kategori optimal.

Variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama (Y) terdiri dari beberapa dimensi penelitian, antara lain:

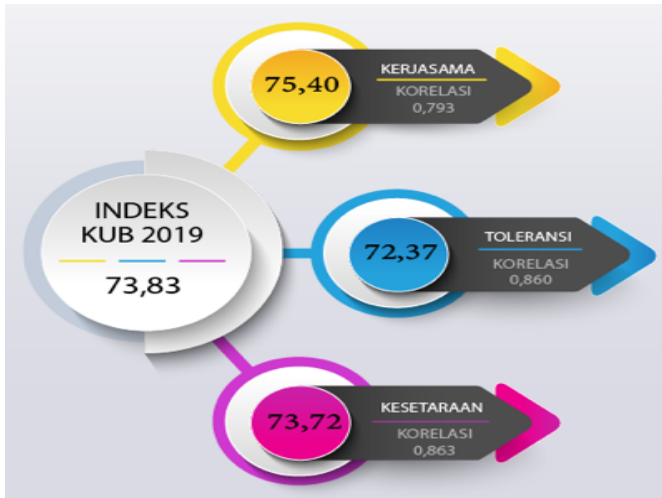
Tabel 3

No	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Skor	Korelasi
1	Toleransi	72,37	0,860
2	Kesetaraan	73,72	0,863
3	Kerjasama	75,40	0,793

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama (Y) menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada diagram jalur, dan tabel uji kesesuaian model berikut:

Gambar 6

Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama (Y)



Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada Variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama (Y) merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor *loading* lambda yang disebut  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel  $(0,05;13600-2)=1,960$ , sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak. Ini berarti seluruh indikator adalah faktor signifikan. Sebab nilai signifikansi faktor *loading* lambda yang dinamakan  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel  $(0,05;13600-2)=1,960$ . Oleh karenanya uji hipotesisnya diambil kesimpulan  $H_0$  ditolak. Ini artinya, semua indikator adalah faktor signifikan dalam membentuk variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama (Y).

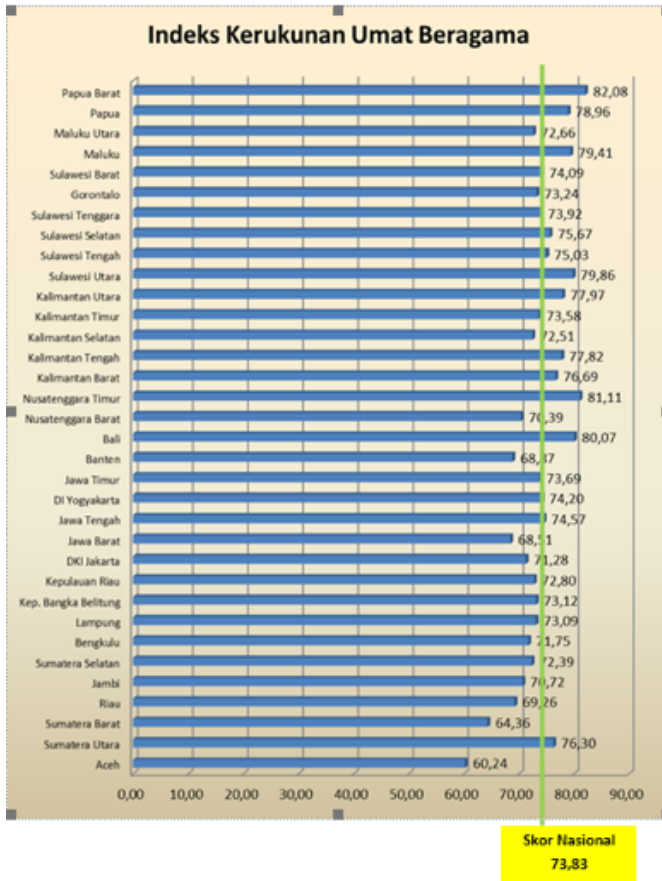
Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama pada masyarakat sehingga dapat efektif menjadi instrumen terhadap kerukunan umat beragama, maka pemerintah perlu meningkatkan mutu semua dimensi, dengan mempertimbangkan skala prioritas peningkatan mutu indikator.

Prioritas terpenting untuk meningkatkan kualitas indikator yaitu dengan meningkatkan kualitas dimensi yang memiliki rata-rata faktor loading terbesar, yakni dimensi kesetaraan dan toleransi. Kesetaraan dan toleransi adalah faktor yang paling dominan. Artinya, jika waktu dan biaya pemerintah dialokasikan untuk meningkatkan kualitas variable Indeks Kerukunan Umat Beragama (Y) terbatas, maka pemerintah harus memprioritaskan perbaikan dari segi kesetaraan dan toleransi.

Cara untuk mengetahui variasi tingkat Kerukunan Umat Beragama di semua provinsi di Indonesia, dapat dilihat dalam diagram berikut:

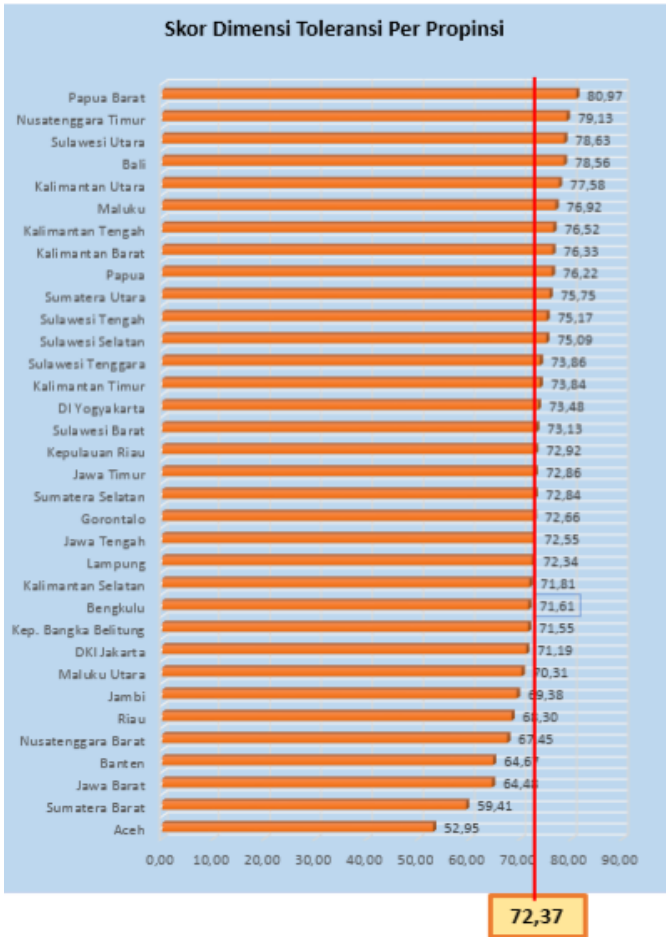


Gambar 7  
 Diagram Skor Indeks Kerukunan Umat Beragama  
 34 Provinsi di Indonesia



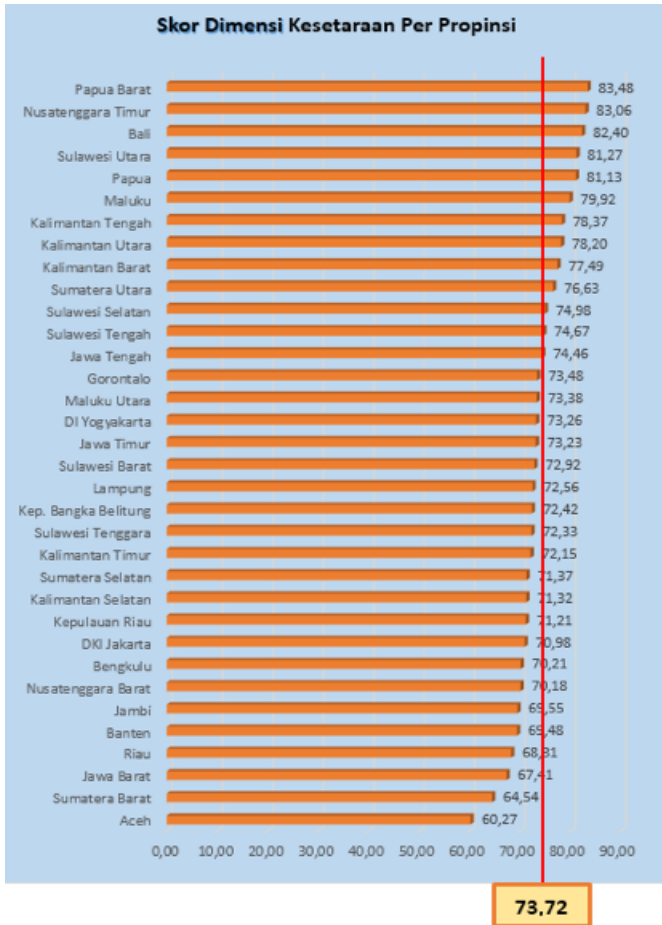
Gambar 8

Diagram Skor Dimensi Toleransi di Indonesia

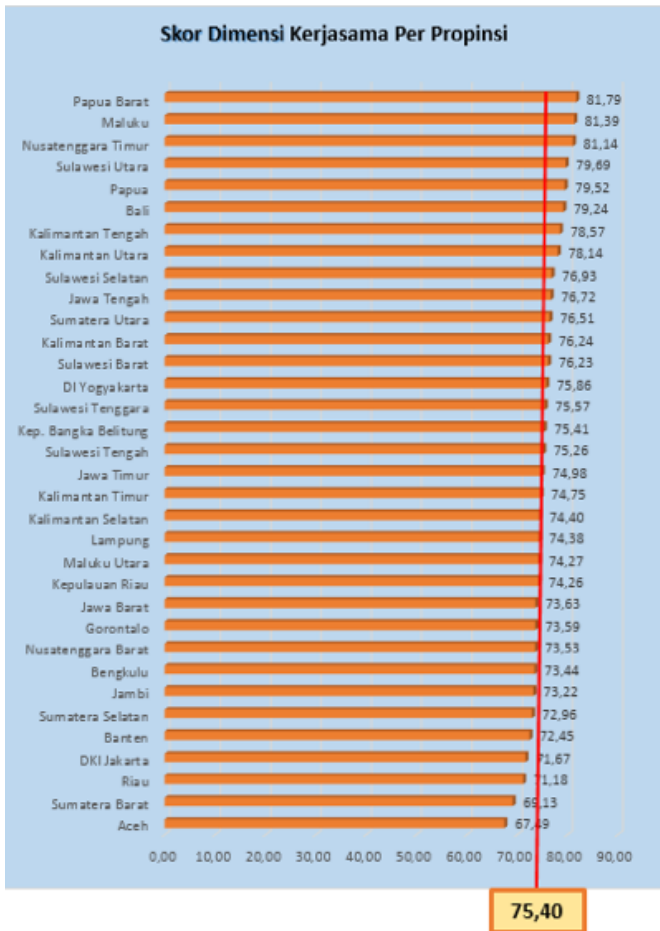


Gambar 9

Diagram Skor Dimensi Kesetaraan di Indonesia

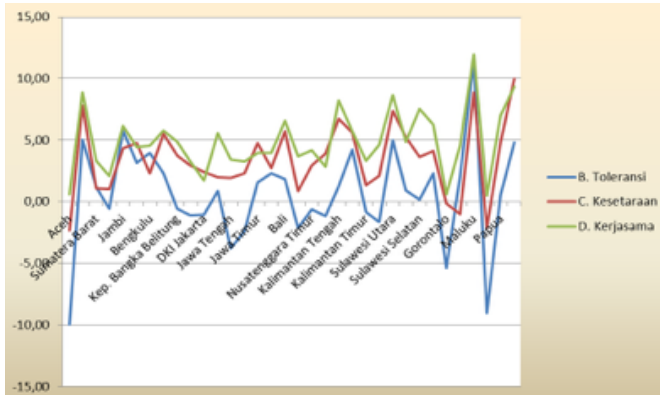


Gambar 10  
 Diagram Skor Dimensi Kerja Sama di Indonesia



Kemudian dapat dilihat pergerakan dimensi yang membentuk Variabel Indeks Kerukunan Umat beragama (Y) dari tahun 2018 sampai 2019, disajikan dalam diagram berikut :

Gambar 11  
Diagram Skor Indeks Kerukunan Umat Beragama  
Tahun 2018-2019



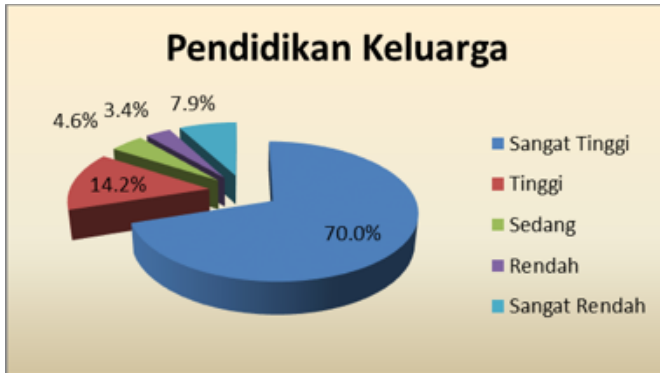
### C. Pola Pendidikan Keluarga ( $X_1$ )

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 provinsi se-Indonesia, maka diperoleh hasil Analisis Kategori untuk Variabel Pola Pendidikan Keluarga ( $X_1$ ) dari seluruh responden yang berjumlah 13600 responden sebagai berikut:

Tabel 4

Pendidikan Keluarga Pada Anak	F	%
Sangat Tinggi	9518	69,99
Tinggi	1926	14,16
Sedang	622	4,57
Rendah	466	3,43
Sangat Rendah	1068	7,85
<b>Total</b>	<b>13600</b>	<b>100,00</b>

Gambar 12



Tabel 12 di atas merupakan hasil analisis deskriptif terhadap Variabel Pola Pendidikan Keluarga ( $X_1$ ) yang dirasakan oleh responden selaku masyarakat dengan kriteria berusia 17 tahun ke atas dan/atau sudah menikah di 34 provinsi se-Indonesia sebanyak 13.600 responden.

Hasil analisis menunjukkan bahwa hampir setengah dari total responden merupakan responden yang memiliki tingkat Pola Pendidikan Keluarga ( $X_1$ ) berada pada kategori Sangat Tinggi. Hal ini terlihat dari tabel tersebut, 9.518 responden (69,99%) memiliki skor penilaian Pola Pendidikan Keluarga yang berada pada kategori *SANGAT TINGGI*. Bahkan 1.926 responden (14,16%) memiliki skor penilaian Variabel Pola Pendidikan Keluarga yang berada pada kategori *TINGGI*.

Kemudian, sebanyak 622 responden (4,57%) memiliki skor penilaian Pola Pendidikan Keluarga yang berada pada kategori *SEDANG*.

Akan tetapi, sebanyak 466 responden (3,43%) memiliki skor penilaian Variabel Pola Pendidikan Keluarga yang berada pada kategori *RENDAH*. Bahkan 1.068 responden (7,85%) yang memiliki tingkat Pola Pendidikan Keluarga berada pada skor yang masuk pada kategori *SANGAT RENDAH*.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Variabel Pola Pendidikan Keluarga ( $X_1$ ) bagi responden di 34 provinsi se-Indonesia yang berjumlah 13.600 orang, dengan cara uji statistik Uji 1 rerata, supaya diketahui jumlah total variabel itu, bahwa sudah mencapai nilai minimum yang ditetapkan (cut off) oleh peneliti sebagai standar variabel yang dapat dikelompokkan dalam kategori optimal.

Tabel 5

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Kesimpulan
	Rerata	Simpangan Baku			
Pendidikan Keluarga	81,12	28,79	81,60	Signifikan	60,00
			81,70	Tidak Signifikan	<b>Pola Pendidikan Keluarga Tinggi</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Variabel Pola Pendidikan Keluarga ( $X_1$ ) secara real dari 13.600 responden yang diteliti hanya mencapai nilai rerata sebesar 81,12 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 28,79. Jadi, skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan, di angka 81,60. Adapun di atas itu, misal di angka 81,70 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 81,60 berarti dapat disimpulkan bahwa “pada populasi masyarakat di 34 provinsi se-Indonesia, skor total Variabel Pola Pendidikan Keluarga ( $X_1$ ) signifikan di angka 81,60. Ini berarti Pola Pendidikan Keluarga termasuk ke dalam kategori Optimal ( $> 66.00$ )”.

Cukup optimalnya Variabel Pola Pendidikan Keluarga masyarakat di 34 provinsi se-Indonesia. Sudah barang tentu terkait dengan skor setiap dimensi penelitian yang telah diukur. Oleh sebab itu harus dilihat item-item mana saja yang memiliki skor persentase tinggi, sedang, rendah, atau sangat rendah. Maka dari itu dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam meningkatkan variabel Pola Pendidikan Keluarga ini, supaya sampai pada kategori optimal.

Variabel Pola Pendidikan Keluarga ( $X_1$ ) terdiri dari beberapa dimensi penelitian, antara lain :

Tabel 6

No	Intensi Medsos	Skor	Korelasi
1	Pendidikan Agama pada Anak	74,49	0,842
2	Pendidikan Moral pada Anak	86,42	0,846
3	Pendidikan Kebhinekaan pada Anak	77,45	0,866

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator Variabel Pola Pendidikan Keluarga ( $X_1$ ) menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada diagram jalur, dan tabel uji kesesuaian model berikut:



Gambar 13

Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Variabel Pola Pendidikan Keluarga ( $X_1$ )



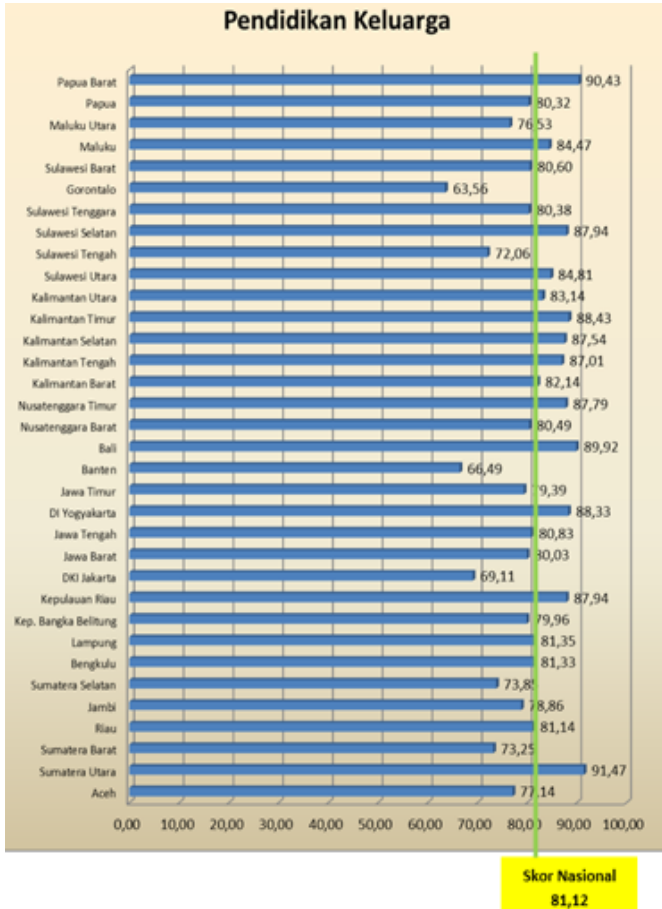
Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada Variabel Pola Pendidikan Keluarga ( $X_1$ ) merupakan faktor yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh nilai signifikasi faktor *loading* lambda yang disebut  $t$  hitung  $>$   $T$  tabel ( $0,05; 13600-2$ ) = 1,960, sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak. Artinya seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan yang membentuk Variabel Pola Pendidikan Keluarga ( $X_1$ ).

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin meningkatkan Pola Pendidikan Keluarga pada masyarakat sehingga dapat efektif menjadi instrumen terhadap kerukunan umat beragama, maka pemerintah harus meningkatkan kualitas dari seluruh dimensi yang ada. Tentunya dengan mempertimbangkan skala prioritas peningkatan mutu indikator.

Prioritas pertama dalam meningkatkan kualitas indikator dapat ditempuh dengan meningkatkan mutu dari sisi yang memiliki rata-rata fakro loading yang terbesar, yakni dimensi Pendidikan Kebhinekaan dan Pendidikan Moral pada anak.

Untuk Melihat bagaimana variasi tingkat Pola Pendidikan Keluarga di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 14  
 Diagram Skor Indeks Pola Pendidikan Keluarga  
 34 Provinsi di Indonesia



#### D. Peran Kementerian Agama (X<sub>2</sub>)

Dari hasil perhitungan deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 provinsi di Indonesia, diperoleh hasil Analisis Kategori

untuk Variabel Peran Kementerian Agama (X<sub>2</sub>) dari semua responden (13.600 responden), yaitu sebagai berikut:

Tabel 7

Peran Kementerian Agama	F	%
Sangat Tinggi	142	1,04
Tinggi	202	1,49
Sedang	481	3,54
Rendah	1044	7,68
Sangat Rendah	11731	86,26
<b>Total</b>	<b>13600</b>	<b>100,00</b>

Gambar 15



Tabel 7 di atas merupakan hasil analisis deskriptif terhadap Variabel Peran Kementerian Agama (X<sub>2</sub>) yang dirasakan oleh responden selaku masyarakat dengan kriteria berusia 17 tahun ke atas dan/atau sudah menikah di 34 provinsi se-Indonesia sebanyak 13600 responden.

Hasil analisis menunjukkan bahwa hampir setengah dari total responden merupakan responden yang memiliki tingkat Peran Kementerian Agama (X<sub>2</sub>) berada pada kategori Sangat

Rendah. Perihal ini tampak pada tabel tersebut sebanyak 11731 responden (86,26%) memiliki skor penilaian peran kementerian agama yang berada pada kategori *SANGAT RENDAH*, bahkan 1044 responden (7,68%) lain memiliki skor penilaian Variabel Peran Kementerian Agama yang berada pada kategori *RENDAH*.

Kemudian, 481 responden (3,54%) memiliki skor penilaian Variabel Peran Kementerian Agama yang berada pada kategori *SEDANG*.

Akan tetapi, sebanyak 202 responden (1,49%) memiliki skor penilaian Variabel Peran Kementerian Agama yang berada pada kategori *TINGGI*, dan bahkan sebanyak 142 responden (1,04%) memiliki skor penilaian Variabel Peran Kementerian Agama yang berada pada kategori *SANGAT TINGGI*.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap variabel Peran kementerian agama ( $X_2$ ) bagi responden di 34 provinsi se-Indonesia yang berjumlah 13.600 orang, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total variabel tersebut telah mencapai nilai minimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh peneliti sebagai standar variabel yang masuk ke dalam kategori optimal.

Tabel 8

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Kesimpulan
	Rerata	Simpangan Baku			
Peran Kementerian Agama	7,93	16,46	8,20	Signifikan	60,00
			8,30	Tidak Signifikan	Peran Kementerian agama Kurang

Tabel di atas tampak rata-rata skor total Variabel Peran Kementerian Agama ( $X_2$ ) secara riil, rai 13.600 responden yang telah diteliti, hanya mencapai nilai rata-rata sebesar 7,93 %, dengan simpangan baku sebesar 16,46%. Maka skor total perkiraan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan, yakni di angka 8,20%. Lebih dari itu, misalnya 8,30%, dianggap tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 8,20% berarti dapat disimpulkan bahwa “pada populasi masyarakat di 34 provinsi se-Indonesia, skor total Variabel Peran Kementerian Agama ( $X_2$ ) signifikan di angka 8,20 yang berarti Peran kementerian agama termasuk ke dalam kategori Belum Optimal ( $< 66.00$ )”.

Belum optimalnya variabel Peran kementerian agama masyarakat di 34 provinsi se-Indonesia, tentunya tidak lepas dari skor setiap dimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, item mana saja yang memiliki skor persentase (%) tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat

dalam meningkatkan variabel Peran kementerian agama ini agar mencapai kategori yang optimal.

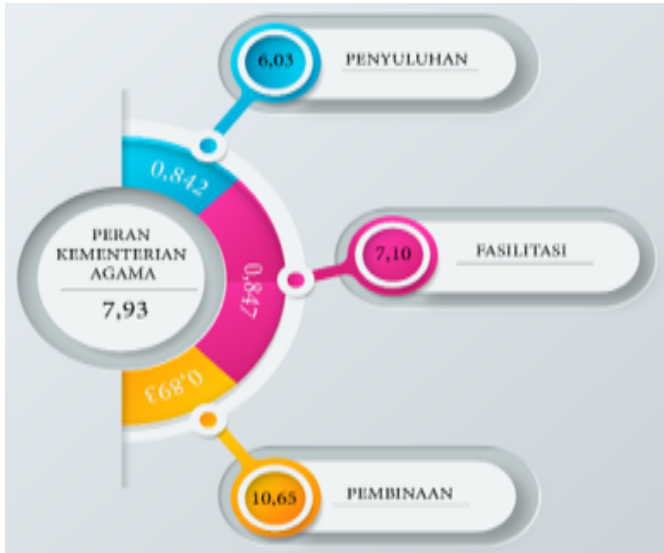
Variabel Peran Kementerian Agama (X<sub>2</sub>) terdiri dari beberapa dimensi penelitian, antara lain:

Tabel 9

No	Peran kementerian agama	Skor	Korelasi
1	Penyuluhan	6,03	0,842
2	Pembinaan	10,65	0,893
3	Fasilitasi	7,10	0,847

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator variabel Peran kementerian agama (X<sub>2</sub>) menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada diagram jalur, dan tabel uji kesesuaian model berikut:

Gambar 16  
Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Variabel  
Peran Kementerian Agama (X<sub>2</sub>)



Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada Variabel Peran Kementerian Agama (X<sub>2</sub>) merupakan faktor yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh nilai signifikansi faktor *loading* lambda yang disebut *t* hitung > *T* tabel (0,05; 13600-2) = 1,960 sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H<sub>0</sub> ditolak yang berarti seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk Variabel Peran Kementerian Agama (X<sub>2</sub>).

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin meningkatkan Peran kementerian agama pada masyarakat sehingga dapat efektif menjadi instrumen terhadap kerukunan umat beragama,

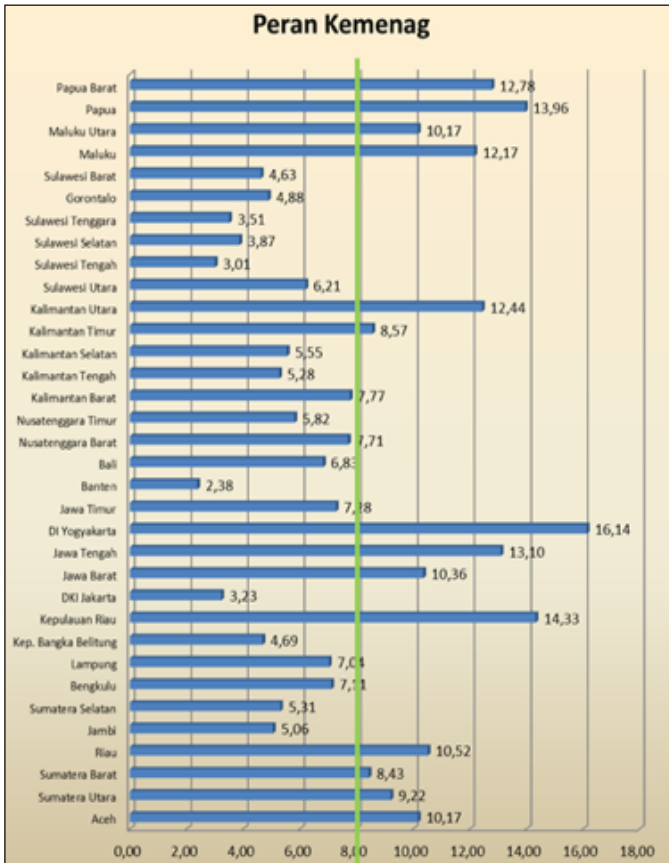


maka pemerintah harus meningkatkan kualitas dari seluruh dimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas peningkatan mutu indikator.

Prioritas utama peningkatan kualitas indikator yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dari dimensi yang memiliki rerata faktor *loading* yang paling besar, yaitu dimensi Pembinaan dan Fasilitas. Kedua dimensi ini adalah faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki pemerintah untuk meningkatkan kualitas Variabel Peran Kementerian Agama (X<sub>2</sub>) terbatas, maka pemerintah dapat mendahulukan perbaikan dari dimensi Pembinaan dan Fasilitas.

Untuk mengetahui variasi tingkat Peran Kementerian Agama pada setiap provinsi di Indonesia, ditampilkan dalam diagram berikut:

Gambar 17  
 Diagram Skor Indeks Peran Kementerian Agama  
 34 Provinsi di Indonesia



### E. Implementasi Kearifan Lokal (X<sub>3</sub>)

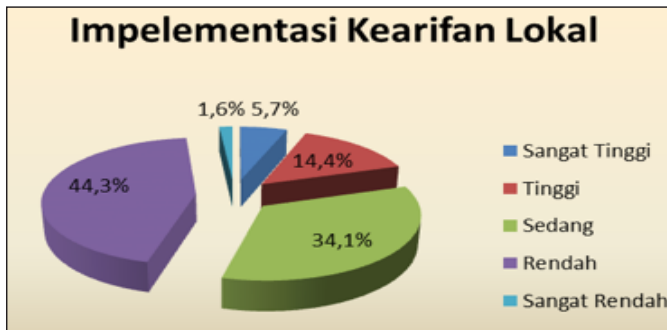
Dari hasil hitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 provinsi di Indonesia, tampak hasil Analisis

Kategori untuk Variabel Implementasi Kearifan Lokal ( $X_3$ ) dari seluruh responden yang berjumlah 13600 responden:

Tabel 10

Implementasi Kearifan Lokal	F	%
Sangat Tinggi	769	5,65
Tinggi	1955	14,38
Sedang	4631	34,05
Rendah	6028	44,32
Sangat Rendah	217	1,60
<b>Total</b>	<b>13600</b>	<b>100,00</b>

Gambar 18



Tabel 18 di atas merupakan hasil analisis deskriptif terhadap Variabel Implementasi Kearifan Lokal ( $X_3$ ) yang dirasakan oleh responden selaku masyarakat dengan kriteria berusia 17 tahun ke atas dan/atau sudah menikah di 34 provinsi se-Indonesia sebanyak 13.600 responden.

Hasil analisis menunjukkan bahwa hampir setengah dari total responden merupakan responden yang memiliki tingkat Implementasi Kearifan Lokal ( $X_3$ ) berada pada kategori Rendah. Ini terlihat dari tabel tersebut, sebanyak 6.028

responden (44,32%) memiliki skor penilaian Implementasi Kearifan Lokal yang berada pada kategori *RENDAH*. Bahkan 217 responden (1,60%) lain memiliki skor penilaian Variabel Implementasi Kearifan Lokal yang berada pada kategori *SANGAT RENDAH*.

Kemudian, 4.631 responden (34,05%) memiliki skor penilaian Variabel Implementasi Kearifan Lokal yang berada pada kategori *SEDANG*.

Akan tetapi, sebanyak 1.955 responden (14,38%) memiliki skor penilaian Variabel Implementasi Kearifan Lokal yang berada pada kategori *TINGGI*. Lebih dari itu sebanyak 769 responden (5,65%) memiliki skor penilaian Variabel Implementasi Kearifan Lokal yang berada pada kategori *SANGAT TINGGI*.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Variabel Implementasi Kearifan Lokal ( $X_3$ ) bagi responden di 34 provinsi se-Indonesia yang berjumlah 13600 orang, maka dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui skor total variabel tersebut, bahwa telah mencapai nilai minimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh peneliti sebagai standar variabel yang masuk ke dalam kategori optimal.

Tabel 11

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Kesimpulan
	Rerata	Simpangan Baku			
<b>Impelementasi Kearifan Lokal</b>	46,99	3,40	47,00	Signifikan	60,00
			47,10	Tidak Signifikan	<b>Peran Kementerian Agama Kurang</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Variabel Implementasi Kearifan Lokal ( $X_3$ ) secara real dari 13.600 responden yang diteliti hanya mencapai nilai rerata sebesar 46,99 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 3,40. Maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan, di angka 47,00. Adapun di atas itu, misal di angka 47,10 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 47,00 berarti dapat disimpulkan bahwa “pada populasi masyarakat di 34 provinsi se-Indonesia, skor total Variabel Implementasi Kearifan Lokal ( $X_3$ ) signifikan di angka 47,00, yang berarti Implementasi Kearifan Lokal termasuk ke dalam kategori Belum Optimal ( $< 66.00$ )”.

Belum optimalnya Variabel Implementasi Kearifan Lokal masyarakat di 34 provinsi se-Indonesia, tentunya tidak lepas dari skor setiap dimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, item mana saja yang memiliki skor persentase (%) tinggi, sedang, dan rendah, atau mungkin skor sangat rendah, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam meningkatkan Variabel Implementasi Kearifan Lokal ini agar mencapai kategori yang optimal.

Variabel Implementasi Kearifan Lokal ( $X_3$ ) terdiri atas beberapa dimensi penelitian, antara lain:

Tabel 12

No	Implementasi Kearifan Lokal	Skor	Korelasi
1	Tingkat kepercayaan masyarakat atas kearifan lokal	71,59	0,508
2	Keterlibatan masyarakat dalam pelestarian kearifan lokal	22,38	0,922

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator Variabel Implementasi Kearifan Lokal ( $X_3$ ) menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada diagram jalur, dan tabel uji kesesuaian model berikut:

Gambar 19

Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Variabel Implementasi Kearifan Lokal ( $X_3$ )



Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada Variabel Implementasi Kearifan Lokal ( $X_3$ ) merupakan faktor yang signifikan. Penyebabnya nilai signifikansi faktor *loading*

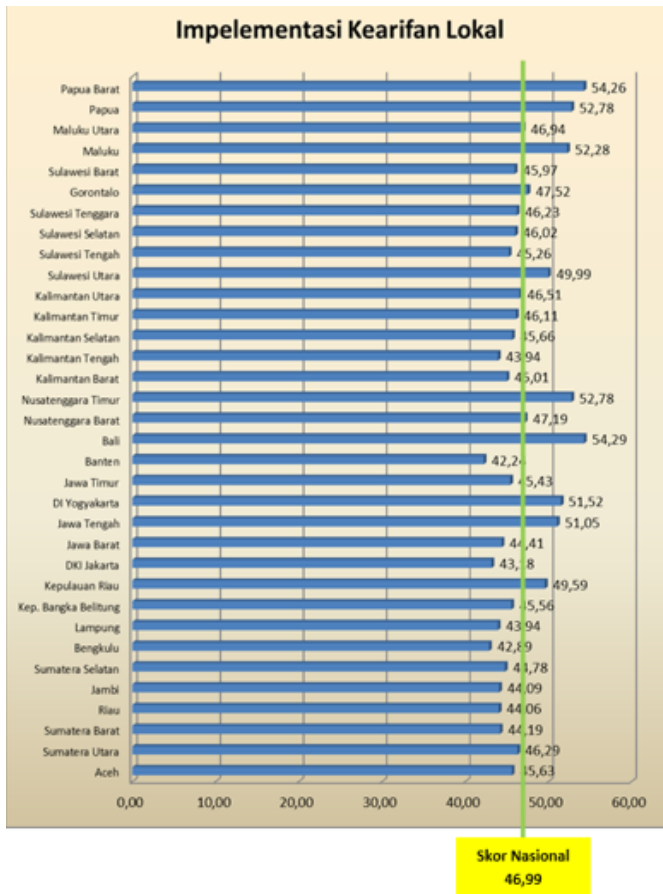
lambda yang disebut  $t$  hitung  $> T$  tabel  $(0,05; 13600-2) = 1,960$  sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak, yang berarti seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk Variabel Implementasi Kearifan Lokal ( $X_3$ ).

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin meningkatkan Aktivitas Sosial pada masyarakat sehingga dapat efektif menjadi instrumen terhadap kerukunan umat beragama, maka pemerintah harus meningkatkan kualitas dari seluruh dimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas peningkatan mutu indikator.

Prioritas utama peningkatan kualitas indikator yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dari dimensi yang memiliki rerata faktor *loading* yang paling besar, yaitu dimensi Tingkat Kepercayaan Masyarakat atas Kearifan Lokal, sebab kedua dimensi ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki pemerintah untuk meningkatkan kualitas Variabel Implementasi Kearifan Lokal ( $X_3$ ) terbatas, maka pemerintah dapat mendahulukan perbaikan dari dimensi Tingkat Kepercayaan Masyarakat atas Kearifan Lokal.

Untuk melihat bagaimana variasi tingkat Implementasi Kearifan Lokal di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 20  
 Diagram Skor Implementasi Kearifan Lokal 34 Provinsi di  
 Indonesia





## F. Model Persamaan Struktural (SEM)

Model Persamaan Struktural (SEM) Pengaruh Variabel Pola Pendidikan Keluarga ( $X_1$ ), Peran Kementerian Agama ( $X_2$ ), Implementasi Kearif-an Lokal ( $X_3$ ), terhadap Indeks Kerukunan Umat Beragama ( $Y$ ). Analisis Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Modeling/SEM*) merupakan suatu model persamaan untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antarvariabel yang bersifat laten (tidak dapat diukur) secara simultan. Jika CFA digunakan untuk mengukur suatu variabel laten melalui indikator-indikatornya (disebut model pengukuran), maka SEM dilakukan untuk melihat pengaruh satu atau beberapa variabel laten terhadap variabel laten lainnya (disebut model struktural), serta digunakan juga untuk melihat variabel laten independen manakah yang paling dominan memengaruhi variabel laten dependen dalam model.

Suatu Model Struktural dalam *SEM* dikatakan fit atau cocok dengan data, jika memenuhi kriteria uji sebagai berikut:

- Nilai statistik inferensi *Chi square* cukup kecil yaitu  $< 2 df$  (*degred of freedom*)
- Nilai p-value *Chi square* cukup besar yaitu  $> 0,05$  atau mendekati 1
- Nilai Statistik deskriptif *RMSEA*  $< 0,08$

Hipotesis :

$H_0 : \Sigma = \Sigma(\theta)$  (Model pengaruh persamaan struktural fit dengan data)

$H_1 : \Sigma \neq \Sigma(\theta)$  (Model pengaruh persamaan struktural tidak fit dengan data)

**Kriteria Uji :**

Terima hipotesis  $H_0$  pada taraf signifikan  $\alpha$  jika kriteria uji di atas terpenuhi.

**Kesimpulan :**

Jika  $H_0$  diterima, maka model pengaruh persamaan struktural fit dengan data

Jika  $H_0$  ditolak, maka model pengaruh persamaan struktural tidak fit dengan data.

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot Gamma) untuk Model Pengaruh Variabel Pola Pendidikan Keluarga ( $X_1$ ), Peran Kementerian Agama ( $X_2$ ), Implementasi Kearifan Lokal ( $X_3$ ), terhadap Indeks Kerukunan Umat Beragama ( $Y$ ) menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada diagram jalur dan tabel uji kesesuaian model berikut :

Gambar 21  
 Diagram Jalur Analisis Model Pengaruh Persamaan Struktural (SEM)



**Tabel 13**  
 Ukuran *Goodnes of Fit* Untuk  
 Model Pengaruh Persamaan Struktural

Indeks Kesesuaian	Nilai	Keterangan
RMSEA	0,0113	Model Mendekati fit

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik *output* pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati *Good Fit*. Perihal tersebut ditunjukkan dalam nilai indeks kesesuaian model dengan menggunakan *RMSEA* yang mendekati 0,08. Menurut Brown dan Cudeck dalam Bachrudin (2002) bahwa apabila kriteria uji statistik

ini terpenuhi, menunjukkan bahwa model pengukuran *Good Fit*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model Pengaruh Persamaan Struktural Variabel Laten *Estimation* (nilai bobot Gamma) untuk Model Pengaruh Variabel Pola Pendidikan Keluarga ( $X_1$ ), Peran Kementerian Agama ( $X_2$ ), Implementasi Kearifan Lokal ( $X_3$ ), terhadap Indeks Kerukunan Umat Beragama ( $Y$ ) mendekati baik atau fit dengan data.

- **Hubungan Variabel Pola Pendidikan Keluarga ( $X_1$ ) dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama ( $Y$ )**

Dari Gambar 3.1 di atas, terlihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Variabel Pola Pendidikan Keluarga ( $X_1$ ) dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama ( $Y$ ) pada 34 provinsi se-Indonesia dengan nilai korelasi yang berada pada angka  $-0,174$  dengan kategori lemah.

- **Hubungan Variabel Peran Kementerian Agama ( $X_2$ ) dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama ( $Y$ )**

Dari Gambar 3.1 di atas, terlihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Variabel Peran Kementerian Agama ( $X_2$ ) dengan Variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama ( $Y$ ) pada 34 provinsi se-Indonesia dengan nilai korelasi yang berada pada angka  $0,061$  dengan kategori sangat lemah.

- **Hubungan Variabel Implementasi Kearifan Lokal ( $X_3$ ) dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama ( $Y$ )**

Dari Gambar 3.1 di atas, terlihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Variabel Implementasi Kearifan Lokal

(X<sub>3</sub>) dengan Variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama (Y) pada 34 provinsi se-Indonesia dengan nilai korelasi yang berada pada angka 0,228 dengan kategori lemah.

- **Hubungan Heterogenitas Agama dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama (Y)**

Dari Gambar 3.1 di atas, terlihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Heterogenitas Agama dengan Variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama (Y) pada 34 provinsi se-Indonesia dengan nilai korelasi yang berada pada angka -0,333 dengan kategori lemah.

- **Hubungan Pendapatan Rumah Tangga dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama (Y)**

Dari Gambar 3.1 di atas, terlihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Pendapatan Rumah Tangga dengan Variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama (Y) pada 34 provinsi se-Indonesia dengan nilai korelasi yang berada pada angka 0,052 dengan kategori sangat lemah.

## **G. Analisis Cluster**

Dari berbagai peta kecenderungan pada tiga variabel di atas, melalui analisis *Cluster*, responden dapat dibagi ke dalam tiga kelompok atau *Cluster* secara signifikan. Berikut tabel *Cluster* dari 13.600 responden di 34 provinsi se-Indonesia tersebut.

Tabel 14  
*Cluster* Kecenderungan  
 Indeks Kerukunan Umat Beragama

	Cluster		
	1	2	3
Pendidikan_Agama	-5,83	-12,58	18,42
Pendidikan_Moral	0,83	-16,67	15,83
Pendidikan_Kebhinekaan	1,61	-18,73	17,11
Penyuluhan	0,92	-4,33	3,42
Pembinaan	4,87	-6,03	1,17
Fasilitasi	1,58	-5,17	3,58
Tingkat_Kepercayaan_terkait_KL	-1,77	-2,07	3,85
Tingkat_Partisipasi_Pelestarian_KL	-6,40	-4,60	11,00
Pendapatan_RT	3446673,44	1091121,44	7569523,44
Toleransi	-1,27	-4,24	1,14
Kesetaraan	-0,74	-1,06	6,71
Kerjasama	76,40	73,96	78,79

Ket : Merah = Rendah; Hijau = Tinggi

### *Cluster* Pertama (1)

Kelompok pertama cenderung Memiliki Tingkat Kerukunan yang Tinggi pada Variabel Pola Pendidikan Kebhinekaan, Pembinaan, Fasilitasi dan Kerja Sama. Namun, kelompok pertama ini cenderung memiliki Tingkat Kerukunan yang Rendah pada Variabel Pola Pendidikan Agama, Tingkat Kepercayaan terkait Kearifan Lokal, Tingkat Partisipasi Pelestarian Kearifan Lokal dan Toleransi.

Kemudian provinsi yang masuk ke dalam *Cluster* 1 yaitu Riau, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat.

Gambar 22 : Cluster 1

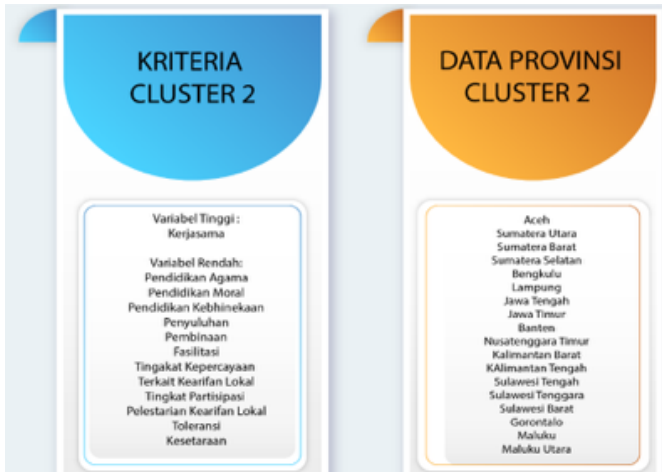


### Cluster Kedua (2)

Kelompok kedua cenderung Memiliki Tingkat Kerukunan yang Tinggi pada Variabel Kerjasama. Namun, kelompok kedua ini cenderung memiliki Tingkat Kerukunan yang Rendah pada Variabel Pola Pendidikan Agama, Pola Pendidikan Moral, Pola Pendidikan Kebhinekaan, Penyuluhan, Pembinaan, Fasilitasi, Tingkat Kepercayaan terkait Kearifan Lokal, Tingkat Partisipasi Pelestarian Kearifan Lokal, Toleransi dan Kesetaraan.

Kemudian provinsi yang masuk ke dalam Cluster 2 yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Nusatenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Gambar 23. Cluster 2



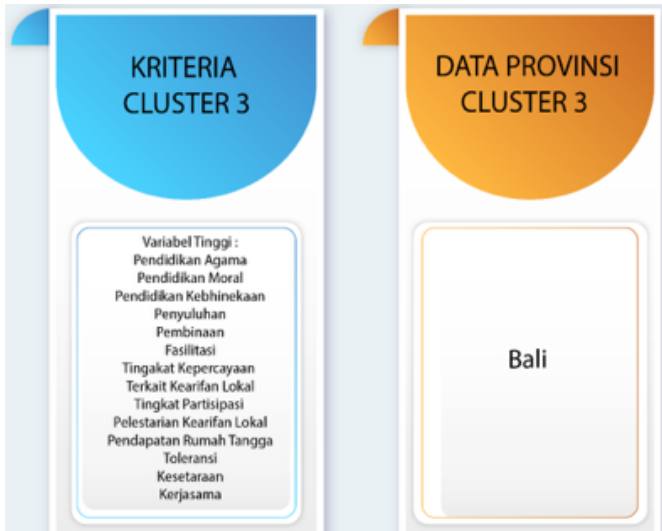
### Cluster Ketiga (3)

Kelompok ketiga cenderung Memiliki Tingkat Kerukunan yang Tinggi pada Variabel Pola Pendidikan Agama, Pola Pendidikan Moral, Pola Pendidikan Kebhinekaan, Penyuluhan, Pembinaan, Fasilitasi, Pendapatan Rumah Tangga, Tingkat Kepercayaan terkait Kearifan Lokal, Tingkat Partisipasi Pelestarian Kearifan Lokal, Toleransi, Kesetaraan, dan Kerja Sama.

Kemudian provinsi yang masuk ke dalam Cluster 3 yaitu Bali.



Gambar 24. Cluster 3



## BAB III

# PENUTUP

### A. Kesimpulan

Terdapat hubungan antara pendidikan, pendapatan, aktif berorganisasi, kearifan lokal, dan peran Kementerian Agama terhadap sikap rukun.

Skor Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) pada tahun 2019 ini menunjukkan angka rata-rata nasional pada poin 73,83 dari rentang 0-100.

Skor Indeks KUB tahun 2019 ini menunjukkan bahwa Indonesia secara rata-rata nasional berada pada kategori kerukunan tinggi (61–80 = Tinggi).

### B. Rekomendasi

Memaksimalkan usaha-usaha pemeliharaan kerukunan dan pencegahan konflik mulai dari tingkat keluarga, lembaga pendidikan, sampai tingkat masyarakat.

Memberikan pelatihan tentang cara menahan diri dari tindakan di luar hukum, di samping memberikan advokasi hukum bagaimana menggunakan jalur yang tidak melanggar

hukum dalam menangani potensi konflik yang dapat meningkat menjadi manifest.

Membantu usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dan Pemda dalam pemeliharaan kerukunan dan pencegahan konflik.

Sebagai bangsa majemuk tak dipungkiri, ada banyak potensi integrasi dan potensi konflik di dalam masyarakat Indonesia. Beberapa potensi konflik/ ketidakrukunan telah termanifestasi di beberapa daerah, namun secara nasional kondisi kerukunan berjalan baik (rukun).

Ada beberapa faktor keagamaan yang dapat mempengaruhi kerukunan, namun faktor non-keagamaan lebih berdampak (seperti kesenjangan ekonomi dan dinamika politik).

Pemerintah telah dan terus melakukan upaya penanganan konflik keagamaan, mengembangkan budaya damai dan toleransi, serta memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan.

Masyarakat (termasuk elemen LSM, media, dan mahasiswa) perlu memperkuat sinergi dalam memelihara kerukunan/keharmonisan masyarakat—sesuai kapasitas dan bidangnya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

Carl Sterkens, Muhammad Machasin, dan Frans Wijzen. 2009. *Religion, Civil Society, and Conflict in Indonesia*. Lit Verlag.

Ali, A. Mukti. 1975. *Agama dan Pembangunan di Indonesia VI*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

Al-rasyid, Harun. 2002. *Teknik Sampling Survey*. Universitas Padjadjaran.

Bakri, Hasbullah. 1983. *Pendekatan Dunia Islam dan Dunia Kristen*. Jakarta: PT. Grafin Utama.

Bogardus, Emory S. 1933. "A Social Distance Scale". *Sociology and Social Research*, 17: 265-271.

Bolland, B.J. 1985. *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970*. Jakarta: Grafiti Press

Endang Turmudi. 1998. "The Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah in East Java and Islamic Politics In Indonesia", *Southeast Asian Journal of Social Science*, vol.26, 1998.

----- .2000. "Reformasi dan Konflik politik Antar Pendukung Partai Islam, Studi Kasus di Jepara", *Masyarakat Indonesia*, Jilid XXVI, No.1: pp. 137-161.

------(ed.). 2004. *Primordialisme kesukuan & golongan dalam masyarakat Indonesia modern: Studi kasus di empat daerah* (Laporan Penelitian). Diterbitkan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI), Jakarta.

----- 2004. "Patronage, Aliran and Islamic Ideologies During Elections in Jombang, East Java" in Hans Antlov ed. *Election in Indonesia*. London: Routledge-Curzon.

----- 2011. "Masalah Kerukunan Umat Beragama di Indonesia" *Jurnal Harmoni*, vol 10, No.3. pp 512-532.

-----"2010. *Masalah Etnik di Thailan Selatan*", *Jurnal Harmoni*, 2010.

Fuller, Graham E. 2010. *A World without Islam*. New York: Little, Brown and Company.

Fuller, Wayne A. 2009. *Sampling Statistics: John Wiley and Sonsinc*. Publication

Geertz, Clifford. 1960. *The Religion of Java*. Glencoe, Ill: The Free Press.

----- 1973. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books.

Gliem, Joseph A. dan Rosemary R. Gliem. 2003. "Calculating, Interpreting, and Reporting Cronbach's Alpha Reliability Coefficient for Likert-Type Scales". Makalah pada *Midwest Research to Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education*.

Jerald D. Gort, D. Jerald., and Jansen, Henry Jansen, and Vroom. 2002. *“Religion, conflict, and reconciliation: Multifaith Ideals and Realities”* Amsterdam: Rodopi.

Intan, Benyamin Fleming. 2006. *Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia*. New York, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, Oxford, Wien. XII ISBN 978-0-8204-7603-2

Jenkins, Richard. 1997. *Rethinking Ethnicity: Arguments and Explorations*. Thousand Oaks, Ca: Sage Publications.

Kaplan, Robert. M and Saccuzzo, Dennis. P. 1993. *Psychological Testing Principles, Application, and Issues*. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California,

Kipp, Rita, Smith. 1993. *Dissociated Identities: Ethnicity, Religion and Class in an Indonesian Society*. Michigan: Univ. of Michigan Press

Koentjaraningrat. 2003. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: Rineka Cipta

Locke, John. 2013. *Two Treatises of Civil Government*. Publisher: TheClassics.us

Mujani, Saiful, Dkk. 2007. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Natsir, Ahmad Amir Aziz, Mustain, Agus Satriawan, dan Ibnu Hizam. 2005. “Pemetaan Kerukunan Hidup Beragama di Lombok”, *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 2, No. 1, Juni 2005.

*Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Bab I, pasal 1, ayat 1. Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006, hal.10.*

Syarifuddin, Amir, Transkrip ceramah pembekalan KKN IAIN Imam Bonjol Padang, Januari 1991, h.1 24

Tangkilisan. 2005. *Manajemen Publik*.

## INDEKS

- Aceh 60
- Agama ii, iii, iv, vii, viii, ix, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 68
- Bali 61
- Banten 60
- Bengkulu 60
- Budaya viii, 2, 5, 6, 64, 67
- DI Yogyakarta 59
- DKI Jakarta 59
- Ekonomi viii, 2, 6, 64
- Gorontalo 60
- Hukum 13, 63, 64, 65
- Implementasi Kearifan Lokal ix, 19, 20, 24, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57  
indeks i, ii, iii, v, viii, x, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 40, 47, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63
- Jambi 59
- Jawa Barat 8, 59
- Jawa Tengah 60
- Jawa Timur 60
- Kalimantan Barat 60
- Kalimantan Selatan 59
- Kalimantan Tengah 60
- Kalimantan Timur 59
- Kalimantan Utara 59
- Kearifan lokal viii, ix, 19, 20, 24, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63
- Kementerian Agama ii, iii, viii, ix, 1, 3, 8, 9, 14, 19, 20, 24, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 55, 57, 63
- Kep. Bangka Belitung 59



Kepulauan Riau 59  
Kerja sama 6, 13  
Kerukunan i, ii, iii, v, vii, viii, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,  
19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 45, 52, 54, 55, 57, 58, 59,  
60, 61, 63, 64, 66, 67, 68  
Kesetaraan viii, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 29, 32, 60, 61  
Konflik vii, 63, 64, 65  
Lampung 60  
Maluku 60  
Nusa Tenggara Barat 59  
Nusatenggara Timur 60  
Pancasila 3, 12, 14, 67  
Papua 59  
Pendapatan 19, 23, 58, 61, 63  
Pendidikan viii, ix, 19, 20, 22, 23, 24, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 54, 55, 57,  
59, 60, 61, 63  
Peran Kementerian Agama ix, 19, 20, 24, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,  
54, 55, 57  
Pola Pendidikan Keluarga ix, 19, 20, 24, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 54, 55, 57  
Sosial iii, iv, viii, 2, 6, 7, 8, 12, 21, 22, 52  
Sulawesi Barat 60  
Sulawesi Selatan 59  
Sulawesi Tengah 60  
Sulawesi Tenggara 60  
Sulawesi Utara 59  
Sumatera Barat 60  
Sumatera Selatan 60  
Sumatera Utara 60  
Survei iii, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19  
Toleransi vii, viii, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 29, 31, 59, 60, 61, 64